

## Kepemimpinan Dalam Krisis COVID-19: Pembelajaran dari Tegal

### Leader in Crisis of COVID-19: Lesson learn from Tegal

Mochamad Doddy Syahirul Alam<sup>1</sup>, Abdul Juli Andi Gani<sup>1</sup>, Astadi Pangarso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Bisnis, School of Business, Universitas Telkom

email: [doddyalam@fisip.upr.ac.id](mailto:doddyalam@fisip.upr.ac.id)

#### Abstrak

Per tanggal 20 Juni 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-30 sebagai negara dengan jumlah positif COVID-19 terbesar yaitu sebanyak 43.803 orang. Dimana masyarakat saat ini agak terkendala dengan aktivitasnya. Akibat jarak fisik dan sosial, pada tanggal 11 Juni pemerintah pusat mulai melonggarkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Diantaranya adalah sektor perdagangan dan transportasi. Sementara sektor lainnya masih menunggu dan berkembang. Melonggarnya kegiatan sosial dan ekonomi yang selanjutnya disebut era normal baru oleh pemerintah pusat membuat kabupaten dan kota mempersiapkan diri. Pemerintah daerah dituntut mampu berkreasi dan berinovasi di era baru perdagangan dan transportasi normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk mempresentasikan bagaimana peran Walikota Tegal yang dianggap mampu menekan resiko penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kota Tegal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode netnografi dimana sumber datanya diperoleh dengan metode tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Tegal yang selama ini dianggap terlalu terburu-buru oleh pemerintah pusat dalam hal *lockdown* atau yang belakangan disebut PSBB (*Large Scale Social Restriction*) membuktikan kebijakannya berhasil menekan jumlah penyebaran COVID-19 dengan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan mulai 30 Maret hingga 31 Juli 2020. Meski akhirnya PSBB berakhir pada 23 Mei 2020 dengan kenaikan 0 di Kota Tegal. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Walikota Tegal dalam menekan pergerakan COVID-19.

**Kata kunci:** *Kepemimpinan; krisis; COVID-19; Tegal*

#### Abstract

As of June 20, 2020, Indonesia is ranked 30th as the country with the largest number of positive COVID-19, amounting to 43,803 people. Where the community is currently a bit constrained by its activities Due to physical and social distance, on June 11, the central government began to loosen the social and economic activities of the people. Among them are trade and transportation sectors. While other sectors are still waiting and developing. The loosening of social and economic activities hereinafter referred to as the new normal era by the central government has made districts and cities prepare themselves. Local governments are required to be able to create and innovate in a

new era of normal trade and transportation while still observing health protocols. This article aims to present the role of the Mayor of Tegal which is considered to be able to reduce the risk of the spread of the COVID-19 pandemic in the City of Tegal.

This research was conducted using the netnography method in which data sources were obtained by the systematic literature review method by using content analysis.

The results showed the Tegal City Government, which had considered the central government in terms of a lockdown or recently called the PSBB (Large Scale Social Restriction), proved its policy was successful in increasing the number promoting COVID-19 with a full locking policy that could be accessed from March 30 to July 31, 2020. Although finally the PSBB ended on 23 May 2020 with an increase of 0 in Tegal City. It is inseparable from the success of Mayor Tegal in moving quickly the movement of COVID-19.

**Keywords:** *Leader; Crisis' COVID-19; Tegal*

## Pendahuluan

Upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten dan kota. Dimana Bupati dan Walikota sebagai pemangku wilayah bertanggungjawab penuh terhadap upaya menekan angka penyebaran virus dan menekan angka kematian. Kota Tegal sebagai salah satu daerah tingkat II di wilayah Propinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup besar dalam upaya menekan angka penyebaran virus dan angka kematian. Meski dianggap sebagai salah satu wilayah yang berhasil dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19 melalui PSBB Kota Tegal berada di tengah wilayah lain yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Yang mana ketiga daerah ini dianggap belum berhasil dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19.

Gambar 1.

Peta Administrasi Propinsi Jawa Tengah



*Sumber: Wikipedia, diakses 24 Agustus 2020*

Jika dilihat kondisi per tanggal 24 Agustus 2020, maka Kota Tegal termasuk dalam kondisi terbaik dibandingkan 3 wilayah yang mengapitnya yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Termasuk juga terbaik se-propinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.**

**Covid-19 di Kota Tegal dan Wilayah Sekitarnya**

Kabupaten/Kota	ODP: Proses	PDP: Dirawat	Poditif: Sembuh	Positif: Meninggal	Positif: Dirawat (dirawat+dirujuk+aps+ isolasi mandiri)
Kota Tegal	0	8	33	3	4
Kabupaten Tegal	24	25	51	9	19
Kabupaten Pemalang	7	13	79	11	46
Kabupaten Brebes	0	7	45	2	29

*Sumber: Tabel Covid-19 di Jawa Tengah, 24 Agustus 2020*

Masyarakat pada dasarnya mampu mengatasi berbagai ancaman dalam pandemi COVID-19 ini, tapi meski ada pihak lain yang menjadi pemandu untuk mengarahkan masyarakat bagaimana harus menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kepemimpinan lokal dibutuhkan untuk memandu masyarakat agar lebih jelas dalam bersikap dan berperilaku, panduan ini dapat dirupakan dalam berbagai bentuk kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas lokal internal yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 bahwa pemerintah bertugas untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana yang juga mengikutsertakan pengurangan resiko bencana. (Humaedi, Seftiani, & Propiona, Jane Kartika, Rembeth, 2014)

Pada masa krisis pandemi COVID-19 ini tingkat stres (ketegangan) setiap kepala daerah otonom relatif lebih meningkat ketimbang kondisi normal sebelum munculnya pandemi, bahkan di level provinsi terlihat lebih tinggi lagi tingkat stresnya. Berbagai kebijakan kaku yang membatasi upaya menekan penyebaran virus dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan propinsi. Sebagian kepala daerah mengambil kebijakan *'wait and see'* dalam menentukan langkah lanjutan. Tapi ada juga ada kepala daerah yang memahami konsep otonomi daerah sebagai sebuah fleksibilitas bagi kepala daerah untuk

melakukan langkah-langkah cepat dalam ‘karantina wilayah’ sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Tegal. (Parahita, 2020)

Gubernur yang diperkirakan lebih patuh terhadap kebijakan nasional dalam bingkai dekonsentrasi ternyata memiliki pandangan tersendiri dalam kebijakannya, dimana otoritas atas batas wilayah dinyatakan secara terang benderang, seperti yang terjadi di DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Papua. Sementara itu, kepala daerah di kabupaten/kota yang diperkirakan memiliki otonomi yang lebih luas, dalam kondisi krisis justru mendapatkan intervensi dari pemerintah provinsi seperti terlihat pada respons Gubernur Jawa Tengah atas ‘karantina lokal/*lockdown*’ oleh Walikota Tegal. Ragam tanggapan kebijakan yang muncul di berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten/lokal menunjukkan bahwa tingkat krisis pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan jumlah terduga tidak menjelaskan manajemen krisis kepala daerah. Surabaya dan Pangkalpinang menjadi kasus yang merepresentasikan hal ini. (Parahita, 2020)

Efektifitas kepemimpinan lokal sangat menentukan keberhasilan daerah dalam mengurangi resiko-resiko bencana. Pemimpin lokal yang mampu mendorong dan menggerakkan anggota masyarakat secara individu, kelompok, maupun komunitas akan dapat mengurangi berbagai resiko bencana yang lebih parah. Meski terkadang upaya-upaya untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat terhalang oleh berbagai perbedaan identitas dan entitas. Individu, kelompok, dan komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan identitas dan entitas yang sama dengan pemimpin lokal relatif lebih mudah didorong digerakkan oleh pemimpin lokal. Tetapi bila keadaannya adalah sebaliknya maka relatif lebih sulit untuk didorong dan digerakkan. Inilah salah satu bentuk tantangan pemimpin lokal khususnya di daerah dalam menghadapi bencana. (Humaedi et al., 2014)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas kepemimpinan lokal diantaranya adalah sifat menerima perbedaan, keteladanan, kewibawaan, dan integritas pribadi yang dimiliki oleh pemimpin lokal tersebut. Abdullah (2006;2007) dalam Humaedi et al. (2014) menyatakan bahwa pengertian perbedaan identitas individu dan komunitas (agama, tingkat sosial, etnik, tradisi budaya, dan lainnya) yang dilahirkan dari kearifan lokal sebagai sistem nilai dan dan sistem sosial budayanya, akan semakin menguatkan peran para pemimpin lokal dalam dalam penanggulangan resiko bencana di daerah dan komunitasnya masing-masing. Sehingga pemimpin lokal yang dianggap efektif dan berhasil dalam upaya mengurangi resiko bencana adalah ketika mampu menyadarkan, mendorong, menggugah, dan memobilisasi peran serta masyarakat dalam situasi bencana; serta mampu mewedahi, bekerjasama, dan menjadi jembatan bagi masyarakat dengan pihak-pihak yang menangani bencana yang berasal dari luar komunitas.

Artikel ini bertujuan untuk mempresentasikan bagaimana peran Walikota Tegal yang dianggap mampu menekan resiko penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kota Tegal. Aksi-aksi Walikota Tegal yang lebih dominan antisipatif dalam menangani krisis kesehatan dan krisis sosial nampak sekali di masyarakat. Ketimbang aksi-aksi reaktif menunggu dampak yang ditimbulkan oleh datangnya pandemi COVID-19 ini di Kota Tegal.

Meski demikian aksi-aksi antisipatif bukannya berjalan dengan mudah, karena Walikota Tegal harus berjibaku dengan waktu untuk menutup secepatnya akses penyebaran COVID-19 di Kota Tegal dan harus berupaya meyakinkan masyarakat Kota Tegal dengan seluruh komponen masyarakat di dalamnya agar peduli dan mematuhi protokol kesehatan, tapi juga harus berusaha keras meyakinkan pemerintah pusat yang kala itu melarang adanya penutupan wilayah secara keseluruhan yang pada awalnya masyarakat menyebutnya dengan istilah "*lockdown*". Istilah ini berkembang di masyarakat karena adanya banyak pemberitaan di media massa mengenai penutupan total wilayah di negara-negara luar seperti di Amerika dan Eropa akibat pandemi COVID-19.

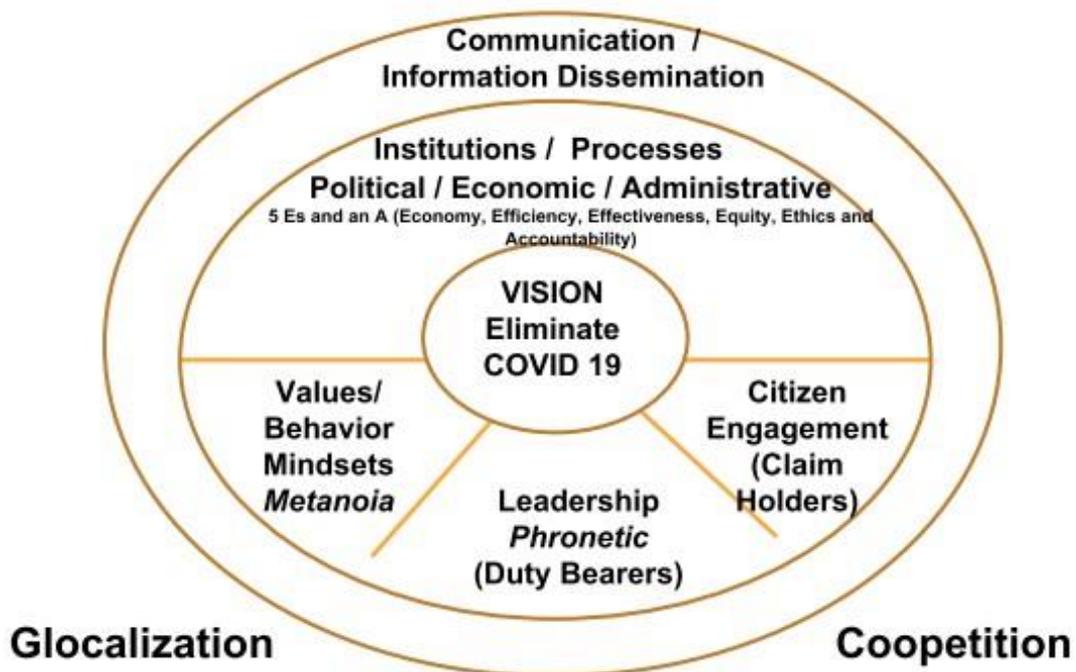
Seorang pemimpin itu perlu untuk menunjukkan empatinya didepan para pendukungnya, hal ini dibutuhkan agar para pendukung dalam hal ini masyarakat tidak merasa sendiri, tidak merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya. (Dotlich, David L.; Cairo, Peter C.; Rhinesmith, 2009) Masyarakat di lapisan manapun meski diyakinkan bahwa pemimpin mereka hadir di tengah-tengah masyarakat ikut merasakan krisis akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan sadar dan ikut mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpinnya dalam menekan resiko bencana yang lebih besar.

Kemampuan seorang pemimpin dalam hal ini Walikota Tegal untuk berempati terhadap situasi yang berkembang dengan aksi-aksi antisipatifnya belum tentu dimiliki oleh Walikota/Bupati di daerah lainnya. Karena rasa empati seorang pemimpin publik itu tidak cukup hanya ditunjukkan dengan ucapan saja akan tetapi perlu tindakan-tindakan nyata. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dotlich et. al (2009) ketika seorang pemimpin tidak memiliki empati terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh orang dipimpinnya, maka sebenarnya pemimpin tersebut kehilangan elemen penting dalam memimpin. Karena dengan menunjukkan empati kepada masyarakat yang dipimpinnya maka ini adalah momentum untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik yang memiliki kesamaan pendapat maupun yang berbeda pendapat. Rasa empati yang dimiliki oleh seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam rangka menjiwai setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam rangka mengatasi krisis yang mendera. Karena pada dasarnya setiap pemimpin publik tidak dapat berbuat secara absolut memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Pilihan yang paling utama dan pertama dalam memimpin di tengah krisis adalah bagaimana caranya mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat yaitu dengan menyelaraskan antara kepala, hati, dan keberanian dalam menghadapi kompleksitas, keragaman, dan ketidakpastian.

Gambar 2.

*Taking off from Reform Governance Framework*



*Sumber: (Brillantes, Lorenzo, & Amidst, 2020)*

Jika kita melihat gambar 2 diatas faktor kepemimpinan adalah salah satu faktor dari upaya mencapai vision eliminate COVID-19 disamping faktor citizen engagement, faktor values/behaviour mindsets, dan institutions/processes/political/economic/administrative. Dengan demikian kepemimpinan menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 dengan cara meningkatkan dukungan publik melalui citizen engagement, meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui perubahan cara berpikir, dan

meningkatkan dukungan berbagai institusi di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang upaya pemimpin untuk menekan penyebaran COVID-19 akan menciptakan tata kehidupan baru yang didalamnya mengandung unsur kompetisi dan glocalisasi.

Daya tanggap seorang pemimpin pemangku wilayah sangat diperlukan dalam menekan resiko wabah yang lebih luas lagi. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil kebijakan untuk melokalisir wilayah sangat menentukan terkendali suatu wabah. Kita mungkin bisa mengambil contoh kegagalan dan keterlambatan pemimpin Negara lain seperti Italia dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Pemerintah Italia terbukti tidak memiliki daya tanggap yang baik dalam menangani penyebaran virus Corona. Italia melarang seluruh penerbangan dari dan menuju Cina sejak 31 Januari 2020. Namun, respon ini ternyata tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus di Italia. Saat tiga pasien positif pertama terdeteksi, Italia tidak mengambil tindakan serius. Penerbangan selain dari dan menuju Cina tetap diadakan dan seluruh aktivitas masih berjalan normal. Sikap tidak tanggap yang sama juga ditunjukkan oleh masyarakat Italia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Vernor Sliver dalam artikelnya yang menyatakan bahwa masyarakat Italia cenderung mengabaikan orang yang terinfeksi COVID-19 pada masa awal penyebaran virus. Kemudian masyarakat tersebut mulai tidak percaya dan takut saat infeksi ini sampai di lingkungan mereka. Ketika penyebaran virus sudah semakin menjadi, mereka baru merasa panik. (Adit S, 2020)

Data dari the *Center for System Science and Engineering* di John Hopkins University menunjukkan pada tanggal 20 Maret 2020 jumlah kasus positif COVID-19 di Italia meningkat lebih dari empat kali menjadi 41.035 kasus. Pasien meninggal di Italia menjadi yang tertinggi di dunia melewati Cina, yaitu 3.405 kasus. Meledaknya jumlah pasien membuat Italia mengalami kekurangan tenaga medis. Keterbatasan jumlah dokter dan perawat menjadi kendala yang besar. Bahkan dokter sekarang harus menentukan prioritas pasien mana yang mesti ditangani terlebih dahulu, karena begitu membludaknya jumlah pasien. (Adit S, 2020)

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19, pemerintah Italia mengambil kebijakan lockdown untuk diterapkan. Awalnya, lockdown hanya diberlakukan di lima belas wilayah pusat pandemi saja. Namun, penyebaran infeksi virus COVID-19 tetap tinggi sehingga terpaksa dilakukan lockdown di seluruh wilayah negara berpenduduk lebih dari enam puluh juta orang ini. (Adit S, 2020)

Berbeda dengan Italia Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan lockdown terhadap wilayah negaranya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Korea Selatan adalah negara republik demokrasi yang perlu waktu untuk menyerap aspirasi masyarakat menetapkan kebijakan *lockdown*. Selain itu Pemerintah Korea Selatan juga merasa bahwa

ketersediaan fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit jumlahnya cukup banyak untuk menampung pertambahan jumlah pasien positif. Ketersediaan tenaga medis dokter jumlahnya dianggap cukup. Keadaan seperti ini menjadi pertimbangan Korea Selatan tidak perlu menerapkan kebijakan *lockdown*. Pemerintah Korea Selatan hanya berfokus pada pencegahan penyebaran virus Corona dengan cara melakukan sebanyak mungkin tes massal. (Adit S, 2020)

Tes massal yang dilakukan Korea Selatan banyak dipuji oleh media internasional. Respon Korea Selatan dinilai cepat dan berhasil menekan laju penyebaran infeksi tanpa ada dampak yang berarti terhadap perekonomian secara nasional. Namun besarnya jumlah tes justru memperbesar angka *error*. Dengan akurasi hasil tes sebesar 98% terdapat 2% *error* yang mungkin terjadi. Angka ini tidak memiliki arti jika sampel yang dites berjumlah sedikit. Namun dengan jumlah sampel 200.000, *error* ini mencapai 4.000 orang. Kekhawatiran lain juga muncul dengan adanya jeda antara tes dan pemberitahuan hasil. Pada jeda tersebut, aktivitas masyarakat yang tidak dibatasi justru memberikan ruang penularan yang lebih besar. (Adit S, 2020)

Sebagaimana jalan yang ditempuh oleh kedua negara tersebut dengan kebijakannya masing-masing dalam menentukan perlu tidaknya *lockdown* untuk menekan penyebaran infeksi virus Corona maka Indonesia juga memiliki langkah dan kebijakan yang berbeda. Pilihan kebijakan tersebut sangat ditentukan situasi dan kondisi suatu wilayah. Hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kondisi infrastruktur kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat secara luas. Indonesia sendiri mengambil kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) yang mana basisnya adalah karantina wilayah tingkat kabupaten/kota untuk PSBB dan karantina wilayah tingkat kelurahan/desa untuk PSBL.

Penyebaran COVID-19 ke seluruh wilayah dunia menyebabkan berbagai pukulan kepada sendi-sendi perekonomian di negara-negara maju, berkembang, dan tertinggal. Yang mana secara simultan mendorong terjadinya permasalahan sosial di masyarakat. Termasuk juga memunculkan masalah terhadap sistem jaminan sosial kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh membludaknya pasien yang sakit karena virus Corona.

Tekanan ekonomi dan sosial yang menuntut kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan layanan kesehatan menyebabkan ancaman terhadap kecakapan kepala negara semakin besar. Tuntutan publik untuk dapat menekan jumlah pertambahan pasien penderita COVID-19 dengan tidak membatasi aktivitas perekonomian masyarakat membuat para kepala negara diuji kemampuannya untuk menjawab tuntutan publik tersebut. Kita sempat melihat ada beberapa pemimpin dunia yang meremehkan kehadiran wabah dari negara Cina ini di wilayah negaranya. Ada yang tidak percaya bahwa virus

tersebut akan masuk ke negaranya. Ada yang tidak percaya bahwa daya sebar virus tersebut sangat cepat. Yang menyebabkan beberapa kepala negara tidak menyiapkan kondisi darurat terburuk yang disebabkan oleh virus Corona ini.

Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Jerman, dan di beberapa tempat lainnya mengambil tindakan yang tepat dengan menjalin komunikasi yang transparan dengan publik dan melakukan pengendalian untuk mencegah bencana nasional yang lebih besar.

Sebagian kepala negara banyak yang mulai mengajukan agenda nasionalis, proteksionis, dan agenda berlandaskan kebencian untuk membohongi publik, sambil menutup mata terhadap kondisi darurat yang saat ini terjadi. Sikap kepala negara yang mengesampingkan terhadap ancaman kondisi darurat ini menjadi bukti ketidakpedulian negara terhadap bahayanya virus Corona. Krisis kesehatan global ini membutuhkan kolaborasi, tanggungjawab, dan solidaritas global, yang berlawanan dengan segala sesuatu yang dipertahankan oleh para kepala negara yang tidak peduli, dan krisis tersebut bergerak terlalu cepat bagi strategi retorika populis untuk bekerja. (Harari, 2020)

Orba, Bolsonaro, dan Trump adalah sebagian kecil contoh kepala negara yang cenderung berperilaku sebagai penguasa yang populis yang keliru dalam menangani dampak ekonomi dan sosial pandemi COVID-19 ini. Pada saatnya, krisis ini akan memberikan pembelajaran kepada seluruh kepala negara dan kepala daerah sebagai pemangku wilayah dalam menyelesaikan persoalan penyebaran virus dan dampak yang ditimbulkannya. Keberhasilan dan kegagalan dalam menangani pandemi ini akan menjadi salah satu tolok ukur kemampuan memimpin seorang kepala negara. Betul atau tidak berjuang untuk masyarakatnya ataukah hanya ingin mengejar dan mempertahankan popularitas.

Sebagian orang memiliki pendapat bahwa penyebaran virus Corona ini adalah akibat globalisasi yang tak mengenal batas, ruang, dan waktu, sehingga yang dibutuhkan adalah de-globalisasi segala bentuk aktivitas masyarakat secara fisik. Hal ini dalam rangka untuk menghambat kecepatan penyebaran virus Corona. Meskipun demikian, isolasi jangka pendek penting untuk menghentikan epidemi, sementara isolasi jangka panjang akan mengarah kepada kejatuhan ekonomi tanpa menawarkan proteksi nyata dalam melawan penyakit menular. Sebaliknya, pencegahan terhadap epidemi bukanlah segregasi, melainkan kooperasi. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin tingkat manapun baik pemimpin negara, pemimpin, daerah, pemimpin adat, pemimpin formal maupun non formal agar mampu menyatukan berbagai sumberdaya masyarakat untuk perang melawan virus Corona. (Harari, 2020)

Pelajaran dari pandemi virus corona diantaranya adalah *Pertama*, sejarah epidemi menunjukkan bahwa kita tidak bisa melindungi diri secara permanen dengan hanya menutup perbatasan. Hal ini mengingatkan bahwa epidemi tersebar secara cepat pada abad

pertengahan, jauh sebelum era globalisasi. Bahkan jika kamu mengurangi koneksi global/hubungan globalisasi seperti yang dilakukan Inggris tahun 1348 hal tersebut tidaklah cukup. Pada abad pertengahan, mengisolasi diri sebagai perlindungan tidak akan cukup. Kita harus pergi ke zaman Batu. Bisakah kita melakukannya?

*Kedua*, sejarah menunjukkan perlindungan yang sesungguhnya datang dari saling berbagi informasi ilmiah yang handal, dan solidaritas global. Ketika salah satu negara terkena epidemi, negara tersebut harus bersedia dengan jujur membagi informasi tentang meningkatnya wabah secara tiba-tiba (*outbreak*) tanpa takut ekonomi akan runtuh sementara negara lain harus mempercayai informasi tersebut dan harus bersedia mengulurkan tangan membantu daripada mengucilkan negara terdampak. Hari ini Cina memberikan pelajaran penting tentang virus corona kepada seluruh negara, tetapi ini semua menuntut kepercayaan dan kerjasama internasional yang tinggi.

Kerjasama internasional dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkah karantina yang efektif. Karantina dengan mengunci rapat pintu keluar dan pintu masuk wilayah (*lock-down*) merupakan tindakan esensial untuk menghentikan penyebaran epidemi. Namun, ketika negara-negara tidak saling percaya satu sama lain dan tiap negara tidak peduli, pemerintah ragu untuk melakukan tindakan semacam itu. Jika kita menemukan 100 virus Corona di negara kita, akankah kita mengunci rapat pintu keluar dan masuk seluruh kota dan wilayah untuk mencegah penyebaran penyakit? Sebagian besar kebijakan ini tergantung kepada apa yang kita harapkan dari negara-negara lain. Mengunci pintu keluar dan masuk suatu wilayah bisa mengarahkan kepada kelumpuhan ekonomi. Namun, apabila kamu berpikir bahwa negara-negara lain akan memberikan pertolongan, maka kita akan cenderung menerapkan kebijakan tegas ini. Akan tetapi, jika kita berpikir bahwa negara-negara lain akan mengabaikan, kita mungkin akan ragu untuk menerapkan kedua tindakan sampai semuanya terlambat. (Harari, 2020)

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanti Djalante dkk yang melakukan review dan analisis terhadap respon Indonesia dalam menanggapi COVID-19 terdapat 5 (lima) rekomendasi yang dapat menjadi bahan acuan dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi dampak dari COVID-19. (Djalante et al., 2020) Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat respons kesehatan seperti yang digariskan oleh WHO, dengan pertimbangan awal risiko zoonosis jangka panjang dan pendekatan *One Health*.
2. Pendekatan proaktif, tanpa penyesalan menyelamatkan nyawa, memperkuat bencana-koordinasi kemanusiaan dan kapasitas pengambilan keputusan untuk pemerintah sub-nasional selama krisis dan situasi darurat.
3. Memperkuat ketahanan ekonomi.

4. Memanfaatkan pengambilan keputusan/pendampingan multi disiplin berbasis sains, didukung *big data/open science*/data warga, memastikan transparansi dan krisis strategis dan komunikasi risiko, serta melibatkan para pemberi pengaruh sosial, terutama mendorong masyarakat umum untuk melakukan isolasi diri dan pencegahan kesehatan.
5. Mempromosikan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas untuk kesiapsiagaan dan kesehatan masyarakat.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode netnografi yakni dengan menggunakan situs-situs internet sebagai sumber informasi tentang pemberitaan penanganan COVID-19 di Kota Tegal Jawa Tengah dengan periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020. Selanjutnya hasil-hasil pemberitaan tersebut dilakukan analisa isi (*content analysis*) dan pembahasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih dalam pentingnya kepemimpinan dalam manajemen krisis yang dicontohkan oleh Walikota Tegal. Selanjutnya kami ingin merekomendasikan bahwa didalam penanganan sebuah pandemi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan didalam mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki suatu wilayah seperti halnya Kota Tegal Jawa Tengah.

## Hasil dan Pembahasan

Masuknya Corona di Kota Tegal ditandai dengan ada satu warga (laki-laki, 34 tahun) dari Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dinyatakan positif COVID-19 yang diketahui baru pulang dari Abu Dhabi. Pasien tersebut masuk RSUD Kardinah Kota Tegal pada 16 Maret 2020 Pukul 02. 00 WIB dini hari. Pasien tersebut pulang dari Abu Dhabi sebagai pekerja di pengeboran minyak.

Ketika Solo memilih istilah KLB (Kejadian Luar Biasa), maka Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengumumkan telah memutuskan kebijakan *local lockdown* pada Rabu, 25 Maret 2020, lantaran status Kota Tegal telah bergeser dari darurat siaga menjadi zona merah virus COVID-19. (Parahita, 2020) Hal tersebut dilakukan dengan cara memasang beton *Movable Concrete Barrier* (MBC) seberat 2 ton yang diberlakukan mulai tanggal 30 Maret 2020 hingga 30 Juli 2020. Walikota Tegal meminta masyarakat untuk memahami kebijakan yang diambilnya. Walikota sadar bahwa kebijakan ini cukup dilematis karena harus menutup akses keluar masuk Kota Tegal. Tentu konsekuensinya adalah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat Kota Tegal. Kebijakan ini populer di masyarakat dengan istilah *Kota Tegal lockdown*. Kebijakan ini diambil dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus Corona. Pada saat kebijakan lockdown ini diambil sudah

ada pasien positif corona sehingga Kota Tegal masuk zona merah darurat Corona. Untuk mengurangi dampak sosial dari kebijakan ini Walikota Tegal membagikan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat kecil atau miskin. Selain menutup akses keluar masuk Kota Tegal upaya lain yang meski dilakukan adalah melakukan pemadaman lampu jalan protokol pada malam hari khususnya pada waktu banyak masyarakat berkumpul. Hingga Kamis, 26 Maret 2020 tercatat oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal ada 41 Orang Dalam Pantauan (ODP), 13 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Tegal, 1 orang PDP meninggal dunia, serta 1 pasien positif COVID-19. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah dengan selalu menghimbau kepada masyarakat Kota Tegal agar tetap di rumah (stay at home) dan bila terpaksa keluar rumah agar selalu menjaga jarak (*social distancing*). (ANTARA, 2020) Kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Tegal ini sebenarnya menunjukkan ketegasannya bahwa untuk menekan penyebaran virus Corona Walikota Tegal tidak perlu menunggu kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. (Parahita, 2020)

#### **Kontroversi *Lockdown***

Kebijakan Walikota Tegal untuk melakukan *lockdown* sempat mendapatkan protes dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan berbagai pihak. Meski Walikota sampaikan sudah mengajukan permohonan izin kepada gubernur. Pada prinsipnya Gubernur Jawa Tengah memberikan izin kepada Walikota Tegal dengan memperhatikan jalur lalu-lintas orang dan barang agar tidak mengganggu operasional jalan provinsi dan nasional. (Bisnis.com, 2020) Putusan Walikota Tegal langsung menarik perhatian gubernur dan pemerintah pusat. Tiga hari sejak mengumumkan *local lockdown*, Walikota Tegal mengganti secara resmi istilah tersebut menjadi isolasi wilayah. Perubahan istilah itu lantaran adanya arahan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal tersebut dilatarbelakangi permintaan pusat agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian program dalam mengkampanyekan physical distancing. Intervensi gubernur dalam kasus ini sendiri menunjukkan bagaimana sosok Ganjar Pranowo menegaskan wilayah Kota Tegal bagaimanapun masih berada dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dibawah kendalinya.

Namun tidak lama setelah Kota Tegal menerapkan lockdown, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pemerintah pusat menyetujui PSBB Kota Tegal berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/258/2020, pada tanggal 17 April 2020. PSBB dianggap oleh Menteri Kesehatan dibutuhkan Kota Tegal karena terjadi peningkatan kasus dan penyebaran virus secara signifikan. Kota Tegal menjadi daerah pertama di Propinsi Jawa Tengah yang menerapkan status PSBB. Kota Bahari ini

menerapkan PSBB dua kali. Pertama pada tanggal 23 April–6 Mei 2020. Selanjutnya diperpanjang hingga 22 Mei 2020.(Bisnis.com, 2020)

Kebijakan cepat lockdown yang diambil oleh Walikota Tegal sebenarnya sejalan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Charpentier, Elie, Laurière, & Tran, 2020)., menyatakan bahwa mereka telah mampu mengidentifikasi bahwa kebijakan *lockdown* yang maksimal akan mampu menekan secara terstruktur terhadap 4 fase penyebaran virus: Pertama, intervensi penguncian yang cepat dan kuat untuk menghentikan pertumbuhan eksponensial penularan. Kedua, fase transisi singkat untuk mengurangi prevalensi virus. Ketiga, periode panjang dengan kapasitas ICU penuh dan prevalensi virus yang stabil, akhirnya interaksi sosial kembali normal dengan lenyapnya virus. Skenario optimal dengan ini menghindari gelombang kedua infeksi, asalkan lockdown tidak buru-buru dibuka. Mereka juga memberikan langkah-langkah intervensi optimal sebagai upaya untuk mendeteksi penularan individu dan tingkat imun seseorang.

### **Tegal Bebas Corona**

Jumat, 22 Mei 2020 Pemerintah Kota Tegal berencana akan mengakhiri kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kota Bahari ini dinyatakan bebas Corona atau COVID-19 setelah sempat melakukan langkah kontroversi karantina wilayah atau lockdown. Untuk memastikan bahwa Kota Tegal telah bebas Corona maka Pemerintah Kota Tegal melakukan penyemprotan desinfektan dalam skala besar dengan menggunakan helikopter, dan mobil baracuda milik Polres Kota Tegal. Keberhasilan Kota Tegal dalam melaksanakan PSBB tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan local lockdown lebih awal, sehingga penyebaran virus dapat lebih terkendali.(Bisnis.com, 2020)

### **Gambar 3.**

#### **Himbauan Penyemprotan Desinfektan Skala Besar**



*Sumber: Pemerintah Kota Tegal*

Meski terbukti efektif dalam menekan penyebaran virus COVID-19, Jumadi Wakil Walikota Tegal mengakui PSBB di Kota Tegal banyak mengalami hambatan. Salah satunya adalah gelombang pemudik dari zona merah yang masih terus berdatangan. Selain itu aktivitas beribadah yang belum menerapkan protokol kesehatan secara penuh masih terus berjalan, hal ini menyebabkan PSBB tidak berjalan maksimal untuk kegiatan beribadah. Belum lagi banyak dari anggota masyarakat yang meluapkan kemarahannya kepada Pemerintah Kota Tegal karena melakukan blokade terhadap akses jalan keluar masuk. Secara tidak resmi sejak tanggal 7 Mei 2020 Kota Tegal bisa dibilang kembali menjadi zona hijau. (Solopos.com, 2020)

### **Belajar Dari Walikota Tegal**

Walikota Tegal memberikan pembelajaran kepada kita bahwa penanganan pandemi COVID-19 di daerah itu tidaklah sederhana membuat kebijakan ditingkat pusat. Karena ruang otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tegal ternyata bukanlah ruang bebas yang bisa kapan saja digunakan oleh Walikota Tegal untuk mengambil langkah-langkah cepat progresif dalam menekan resiko penyebaran virus. Hal tersebut masih harus dilakukan dengan melakukan kajian lebih lanjut secara administrasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Koordinasi dengan Gubernur masih harus dilakukan dalam penyelarasan dengan pemerintah pusat terkait dengan penyebutan istilah karantina wilayah.

Meski demikian kita bisa mengambil pembelajaran terhadap kepemimpinan Walikota Tegal yang tidak kehilangan semangat dan energi untuk bertindak secara cepat dalam melindungi Kota Tegal dari virus Corona. Walikota Tegal juga legowo ketika ditegur oleh gubernur agar memperhatikan kepentingan nasional dengan tidak menutup akses jalan provinsi dan nasional.

### Penutup

Untuk menangani penyebaran virus Corona di daerah dibutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang cepat dan tanggap terhadap perkembangan penyebaran virus Corona. Dimensi waktu adalah penentu keberhasilan dalam upaya menekan penyebaran virus Corona beserta dampak yang ditimbulkannya. Upaya-upaya taktis dan strategis meski dijabarkan dalam langkah-langkah konkrit.

Walikota Tegal sebagai pemangku wilayah telah membuktikan kompetensinya sebagai kepala daerah yang handal dalam menangani ancaman wabah virus Corona. Hal ini terbukti jumlah penderita COVID-19 sampai dengan akhir bulan Agustus ini masih terkendali dan menyandang zona hijau sejak awal Agustus 2020. Dengan demikian respon cepat diawal penyebaran virus Corona itu menjadi penentu keberhasilan pengendalian virus selanjutnya.

### Referensi

- Adit S, M. A. P. M. (2020). Prioritas Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Balairung Press*. Retrieved from [www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-covid-19/](http://www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-covid-19/)
- ANTARA. (2020). *Tegal tutup 50 titik perbatasanantisipasi*.
- Bisnis.com. (2020). *Tegal Bebas Corona , Kontroversi Lockdown yang Kini Dipuja*.
- Brillantes, A., Lorenzo, M. P., & Amidst, C. (2020). *Amidst COVID-19: The Ongoing Experience of the Philippines Our gratitude to IAPA* ,. (May).
- Charpentier, A., Elie, R., Laurière, M., & Tran, V. C. (2020). *COVID-19 pandemic control: balancing detection policy and lockdown intervention under ICU sustainability*. 1–48. Retrieved from <http://arxiv.org/abs/2005.06526>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., ... Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dotlich, David L.; Cairo, Peter C.; Rhinesmith, S. H. (2009). *LEADING In Times Of Crisis* (First). San Fransisco, USA: Jossey-Bass.
- Harari, Y. N. et. a. (2020). *Wabah, Sains, dan Politik* (I, Juni 20; M. P. T. K. Maqin, Khoiril' Taufiqurrahman; Hukmi Risalatul; Nurcahyo, Fajar; Zaenuri, ed.).

Yogyakarta: Antinomi Institute.

- Humaedi, M. A., Seftiani, S., & Propiona, Jane Kartika, Rembeth, J. V. (2014). Para Pencipta Habitus Pengurangan Risiko Bencana : Menakar Peranan Pemimpin Lokal Dalam Situasi Bencana. *Prosiding Pemaparan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Tahun 2014*, 129–141. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Parahita, G. D. (2020). Lima Dimensi Jurnalisme Krisis COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (Kesatu). Retrieved from <https://digitalpress.ugm.ac.id/book/257>
- Solopos.com. (2020). *PSBB Kota Tegal Berhasil , Kini 0 Kasus*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.